

PERAN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM MENGATASI KESENJANGAN PENDIDIKAN DI MASYARAKAT

Ridwan Hermawan^{1*}, Nisa Putri Wulandari², Vera Siti Magfiroh³, Cecep Hilman³
Institut Madani Nusantara, Indonesia

¹ridwan.ub9@gmail.com, ²nisaputri200024@gmail.com,
³vera.ais.ec@gmail.com, ⁴cecephilman77@gmail.com,

Received: 05-05-2025

Revised: 18-05-2025

Approved: 25-05-2025

ABSTRAK

Kesenjangan pendidikan masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah, terutama pada masyarakat yang kurang terjangkau oleh layanan pendidikan formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan berbasis masyarakat sebagai alternatif strategis dalam mengatasi kesenjangan tersebut. Metode yang digunakan adalah kajian teoritis dengan menelaah berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat memiliki potensi besar dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok marjinal. Pendekatan ini bersifat partisipatif, kontekstual, dan fleksibel, sehingga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik lokal. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan turut memperkuat rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Kajian ini menyimpulkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat tidak hanya mampu menjadi pelengkap sistem pendidikan formal, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan sosial yang inklusif. Untuk itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh lokal, agar pendekatan ini dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi kesenjangan pendidikan di masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan Berbasis Masyarakat, Kesenjangan Pendidikan, dan Inklusi Pendidikan

PENDAHULUAN

Kesenjangan pendidikan masih menjadi isu krusial di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Ketimpangan ini tercermin dalam akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda (UNESCO, 2022). Hal ini memperlebar jurang kesejahteraan sosial dan memengaruhi masa depan generasi muda dari kelompok marginal.

Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan akses pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Namun, capaian program-program ini masih menghadapi kendala implementasi, terutama dalam menjangkau kelompok yang paling membutuhkan (Kemendikbud, 2023).

Salah satu pendekatan alternatif yang mulai mendapat perhatian adalah pendidikan berbasis masyarakat (Community-Based Education/CBE). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pendidikan, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Pendidikan berbasis masyarakat memiliki keunggulan karena mampu menyesuaikan isi dan metode pembelajaran dengan kondisi sosial-budaya setempat. Dengan melibatkan tokoh lokal dan memanfaatkan sumber daya komunitas, pendekatan ini lebih relevan bagi masyarakat yang terpinggirkan (Sutarto & Mardikanto, 2020).

Penelitian oleh Baldrige, Beck, Medina, dan Reeves (2017) menunjukkan bahwa ruang pendidikan yang berbasis komunitas memiliki potensi untuk mengganggu pola

ketidaksetaraan pendidikan dan memberdayakan pemuda dari kelompok yang terpinggirkan. Studi ini menekankan pentingnya menciptakan ruang belajar yang partisipatif, fleksibel, dan bermakna secara sosial.

Meskipun kajian tentang pendidikan berbasis masyarakat sudah cukup berkembang di luar negeri, penerapannya dalam konteks Indonesia masih kurang diteliti secara mendalam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui kajian yang lebih kontekstual.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menemukan pendekatan pendidikan yang inklusif dan kontekstual dalam rangka mengatasi ketimpangan yang masih terjadi di masyarakat. Pendidikan formal saja tidak cukup untuk menjangkau seluruh elemen masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.

Ketimpangan pendidikan yang terus berlangsung mencerminkan kegagalan sistem dalam menyediakan akses yang adil dan merata. Ini menunjukkan bahwa inovasi dalam pendekatan pendidikan menjadi kebutuhan yang mendesak (Tilaar, 2009). Kajian tentang CBE di Indonesia umumnya masih terbatas pada level deskriptif dan belum banyak mengkaji faktor-faktor strategis yang dapat mendukung keberhasilannya. Ini membuka ruang bagi penelitian yang lebih dalam dan terstruktur untuk mengevaluasi potensi pendekatan ini dalam mengatasi kesenjangan pendidikan.

Penelitian ini mencoba menjawab tantangan tersebut dengan melakukan kajian teoritis terhadap peran pendidikan berbasis masyarakat dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di masyarakat Indonesia, dengan menyoroti faktor-faktor kunci yang mendukung atau menghambat implementasinya.

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat; (2) mengkaji penerapan pendidikan berbasis masyarakat dalam konteks Indonesia; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan CBE sebagai strategi pemerataan pendidikan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (library research) yang mengkaji teori, penelitian terdahulu, dan kebijakan terkait pendidikan berbasis masyarakat serta kesenjangan pendidikan.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan model pendidikan yang lebih adil serta memberikan masukan praktis bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas dalam merancang program pendidikan yang relevan dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat landasan bagi implementasi pendidikan berbasis masyarakat sebagai strategi alternatif dalam menanggulangi kesenjangan pendidikan di Indonesia secara partisipatif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian teoritis (theoretical study) yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep serta peran pendidikan berbasis masyarakat dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Kajian teoritis dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai teori, konsep, dan praktik yang telah ada sebagai dasar untuk memahami fenomena sosial dan pendidikan (Neuman, 2014).

Sumber data dalam kajian ini berasal dari literatur sekunder, seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah bereputasi, laporan kebijakan pendidikan, serta dokumen dari organisasi internasional seperti UNESCO dan World Bank. Kriteria seleksi sumber mencakup relevansi, validitas ilmiah, serta kebaruan dengan prioritas

pada publikasi dalam rentang waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir (Creswell & Creswell, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yang mencakup penelusuran artikel ilmiah melalui basis data seperti Scopus, Google Scholar, ResearchGate, dan portal jurnal nasional. Literatur yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan tema dan relevansi dengan topik penelitian, khususnya yang membahas tentang pendidikan berbasis masyarakat dan kesenjangan pendidikan (Zed, 2008).

Proses analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengklasifikasikan isi literatur ke dalam kategori tematik seperti prinsip-prinsip CBE, bentuk pelaksanaan, peran aktor lokal, serta dampaknya terhadap pemerataan pendidikan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar konsep secara sistematis (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Selain itu, digunakan pendekatan analisis konten (content analysis) untuk menafsirkan makna dari teks-teks ilmiah yang dikaji, guna memahami bagaimana konsep pendidikan berbasis masyarakat dibingkai dan dikontekstualisasikan dalam berbagai studi sebelumnya (Krippendorff, 2018). Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat kesenjangan dalam literatur yang ada sebagai dasar penguatan kontribusi teoretis penelitian ini.

Dengan menggunakan metode kajian teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam wacana akademik mengenai pendidikan berbasis masyarakat. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat dijadikan rujukan praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku pendidikan dalam merumuskan strategi yang inklusif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di masyarakat (Baldrige et al., 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community-Based Education)

Pendidikan berbasis masyarakat atau community-based education (CBE) merupakan pendekatan pendidikan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pendidikan. Pendekatan ini memposisikan komunitas lokal tidak hanya sebagai penerima manfaat pendidikan, tetapi juga sebagai penggerak utama yang menentukan arah dan bentuk pendidikan itu sendiri. CBE mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pendidikan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penilaian hasil, sehingga proses belajar menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan realitas lokal (UNESCO, 2022).

CBE lahir dari kesadaran bahwa pendidikan tidak semata-mata merupakan tanggung jawab institusi formal seperti sekolah atau pemerintah, melainkan juga bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan berbasis masyarakat mengusung prinsip kolaboratif dan partisipatif yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan kearifan lokal. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering kali melibatkan tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan keluarga sebagai bagian dari ekosistem pendidikan (Sutarto & Mardikanto, 2020).

Salah satu karakteristik penting dari pendidikan berbasis masyarakat adalah desain kurikulum dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Proses pendidikan ini tidak bersifat seragam, melainkan dirancang berdasarkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Misalnya, di daerah pedesaan

yang berbasis pertanian, kurikulum bisa diintegrasikan dengan pengetahuan agrikultur lokal dan praktik pertanian berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa pendidikan benar-benar memberikan manfaat praktis bagi peserta didik dan komunitasnya.

Keunggulan lain dari CBE terletak pada fleksibilitasnya dalam menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Masyarakat adat, komunitas miskin kota, dan kelompok marjinal lainnya sering kali merasa lebih nyaman dan dihargai dalam sistem pendidikan berbasis masyarakat karena pendekatan ini menghormati nilai-nilai lokal dan mendorong ekspresi identitas budaya mereka. Dengan demikian, CBE berpotensi besar dalam mengurangi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai lapisan masyarakat (Tilaar, 2009).

Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat Di Indonesia

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendidikan berbasis masyarakat menjadi strategi penting untuk memperkuat kapasitas lokal, membangun kesadaran kritis, dan menciptakan kemandirian komunitas. Ketika masyarakat memiliki kontrol terhadap proses pendidikan, maka hasil yang dicapai cenderung lebih berkelanjutan karena didorong oleh rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, integrasi CBE dalam kebijakan pendidikan nasional menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, relevan, dan berkeadilan sosial.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan berbasis masyarakat telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk yang mencerminkan kreativitas dan inisiatif lokal. Contoh konkret dari implementasi ini antara lain taman bacaan masyarakat (TBM), sekolah alternatif, pesantren, program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C, serta program berbasis desa seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Setiap inisiatif ini berupaya menjawab kebutuhan pendidikan warga dengan pendekatan yang fleksibel, murah, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Keberadaan berbagai bentuk pendidikan non-formal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi besar untuk mengorganisasi proses belajar yang berkelanjutan, kontekstual, dan inklusif (Kemendikbud, 2023).

Faktor Penyebab Kesenjangan Pendidikan

Urgensi penerapan community-based education (CBE) semakin nyata jika kita menelaah berbagai faktor penyebab kesenjangan pendidikan di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah faktor geografis. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan besar dalam menyediakan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Di wilayah-wilayah ini, banyak anak yang harus menempuh jarak jauh untuk mencapai sekolah, atau bahkan tidak memiliki fasilitas pendidikan sama sekali. Kondisi ini berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi sekolah, tingginya angka putus sekolah, dan rendahnya kualitas pendidikan (World Bank, 2020).

Selain faktor geografis, kondisi ekonomi masyarakat juga sangat memengaruhi akses dan keberlanjutan pendidikan. Keluarga yang berada dalam garis kemiskinan sering kali harus memilih antara kebutuhan dasar dan pendidikan anak. Biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan hilangnya potensi pendapatan jika anak tidak bekerja menjadi kendala nyata dalam menyekolahkan anak. Dalam banyak kasus, anak-anak dari keluarga miskin lebih rentan untuk terputus dari sistem pendidikan karena tekanan ekonomi yang tinggi. Hal ini menciptakan lingkaran setan antara kemiskinan

dan rendahnya tingkat pendidikan, yang pada gilirannya membatasi peluang peningkatan kesejahteraan di masa depan (UNESCO, 2022).

Peran Dan Keunggulan CBE Dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan

Pendidikan berbasis masyarakat hadir sebagai alternatif yang mampu menanggulangi berbagai hambatan tersebut dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Misalnya, PKBM dapat diselenggarakan di balai desa atau rumah warga, dengan jadwal yang menyesuaikan waktu luang peserta didik. Taman bacaan masyarakat memberikan akses literasi dasar tanpa biaya, dan pesantren memberikan pendidikan yang terjangkau sekaligus memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual. Fleksibilitas inilah yang membuat CBE lebih mampu menjangkau masyarakat marginal dan menciptakan solusi yang tepat sasaran untuk kebutuhan lokal.

Dengan demikian, penguatan pendidikan berbasis masyarakat menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan ketimpangan akses dan mutu pendidikan di Indonesia. CBE bukan hanya pelengkap dari sistem pendidikan formal, melainkan bagian penting dari strategi pendidikan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Dukungan kebijakan, pendanaan, serta pelatihan bagi pengelola dan fasilitator CBE sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan program. Ke depan, integrasi antara pendidikan formal, non-formal, dan informal perlu terus dibangun agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh hak pendidikan yang layak dan bermakna.

Ketimpangan infrastruktur dan distribusi tenaga pendidik masih menjadi tantangan besar dalam sistem pendidikan Indonesia. Sekolah-sekolah di daerah terpencil dan perbatasan sering kali menghadapi berbagai keterbatasan, seperti minimnya fasilitas, bangunan yang tidak layak, serta ketiadaan akses terhadap teknologi pembelajaran. Selain itu, banyak dari sekolah ini kekurangan guru, terutama guru berkualitas dan tersertifikasi. Ketimpangan ini berkontribusi pada rendahnya kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa di wilayah-wilayah yang kurang berkembang (Kemendikbud, 2023).

Dalam kondisi seperti ini, pendidikan berbasis masyarakat (community-based education atau CBE) muncul sebagai solusi alternatif yang relevan dan adaptif. CBE tidak bergantung sepenuhnya pada struktur formal pendidikan, melainkan memanfaatkan sumber daya lokal—baik manusia maupun materi—untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Dengan melibatkan warga sebagai pengajar, relawan, atau fasilitator, CBE dapat menjadi pendekatan pendidikan yang hemat biaya namun tetap bermakna dan efektif. Konsep ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menjadi pelaku aktif dalam penyelenggaraan pendidikan (Zubaedi, 2011).

Salah satu kekuatan utama CBE adalah kemampuannya untuk menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Kelompok ini mencakup masyarakat adat, anak jalanan, perempuan di daerah pedalaman, hingga warga yang putus sekolah. Pendidikan berbasis masyarakat tidak hanya mengejar pencapaian akademik, tetapi juga menekankan aspek pemberdayaan individu dan komunitas. Dengan pendekatan ini, pendidikan menjadi sarana untuk membangun karakter, meningkatkan keterampilan hidup, dan memperkuat daya saing lokal (Sardiman, 2018).

Selain sebagai media pembelajaran, CBE juga berfungsi sebagai wahana pelestarian nilai-nilai lokal dan pembentukan kohesi sosial. Proses belajar dalam CBE sering kali berlangsung dalam suasana informal dan kolektif, di mana nilai gotong

royong, solidaritas, dan kerja sama menjadi bagian dari pengalaman pendidikan. Dengan model ini, pendidikan tidak dipandang sebagai aktivitas eksklusif di ruang kelas, melainkan sebagai bagian dari dinamika kehidupan masyarakat sehari-hari. Interaksi antargenerasi dalam kegiatan belajar juga memperkaya proses pembentukan identitas dan pewarisan budaya lokal (Ibrahim, 2017).

Dalam berbagai studi, CBE terbukti mampu mendorong transformasi sosial melalui pendidikan yang bersifat transformatif dan partisipatif. Menurut Baldrige et al. (2017), pendidikan berbasis komunitas memiliki potensi disruptif terhadap struktur ketimpangan sosial. Dalam penelitian mereka, keterlibatan pemuda dalam kegiatan pendidikan komunitas bukan hanya meningkatkan motivasi belajar, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap perubahan sosial di lingkungan mereka. Pendidikan semacam ini memupuk kesadaran kritis, yang menjadi bekal penting dalam membangun masyarakat yang adil dan setara.

Implementasi CBE di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sistem pendidikan formal. Misalnya, program pendidikan kesetaraan yang dijalankan melalui PKBM berhasil menjangkau warga belajar dewasa yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Di daerah pesisir dan pegunungan, taman bacaan masyarakat menjadi pusat literasi bagi anak-anak yang tidak memiliki akses perpustakaan. Bahkan di wilayah perkotaan, sekolah alternatif dan komunitas belajar mandiri mulai berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih fleksibel dan relevan.

Namun demikian, keberhasilan CBE sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Diperlukan regulasi yang jelas, pendanaan yang berkelanjutan, serta pelatihan untuk fasilitator dan pengelola program agar kualitas dan keberlanjutan CBE dapat terjaga. Selain itu, sinergi antara pendidikan formal dan non-formal perlu dibangun agar tidak terjadi dualisme sistem, tetapi justru memperkuat ekosistem pendidikan secara keseluruhan.

Ke depan, pengembangan pendidikan berbasis masyarakat harus diarahkan pada penguatan kapasitas komunitas untuk mengelola pendidikan secara mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan ini bukan sekadar solusi sementara, tetapi dapat menjadi pilar penting dalam membangun sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif, adil, dan kontekstual. Dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat, pendidikan akan menjadi milik bersama bukan hanya milik negara atau institusi formal dan mampu menjawab tantangan zaman secara lebih tanggap dan manusiawi.

Studi Kasus Dan Praktik Pendidikan Berbasis Masyarakat

Salah satu contoh praktik terbaik (best practice) dari pendidikan berbasis masyarakat (community-based education atau CBE) adalah program Barefoot College di India. Program ini memberikan pelatihan teknis kepada perempuan dari desa-desa terpencil untuk menjadi teknisi tenaga surya. Para perempuan ini, yang sebagian besar buta huruf atau tidak menyelesaikan pendidikan formal, dibekali keterampilan merakit dan memasang panel surya guna menerangi desa mereka sendiri. Keberhasilan Barefoot College menunjukkan bahwa pendidikan teknis tidak harus berlangsung di institusi formal yang mahal, melainkan bisa dilaksanakan melalui pendekatan kontekstual, berbasis komunitas, dan berorientasi pada pemberdayaan perempuan marginal (Roy, 2010).

Di Indonesia, contoh praktik serupa dapat ditemukan dalam kegiatan Sanggar Belajar Yayasan Usaha Mulia di Yogyakarta. Sanggar ini merupakan wadah pendidikan informal yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan pelatihan keterampilan, seperti menjahit, berkebun, dan pengelolaan sampah. Program ini tidak hanya menyediakan ruang belajar alternatif bagi anak-anak dan remaja dari keluarga kurang mampu, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam merancang dan menjalankan program pembelajaran. Keterlibatan orang tua, tokoh masyarakat, dan relawan lokal menciptakan lingkungan pendidikan yang hangat, partisipatif, dan berorientasi pada kemandirian (Setiawan, 2019).

Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga menjadi salah satu bentuk implementasi CBE yang paling luas di Indonesia. PKBM menyediakan layanan pendidikan non-formal seperti program kesetaraan (Paket A, B, dan C), kursus keterampilan, hingga pelatihan kewirausahaan. Keunggulan PKBM terletak pada fleksibilitas waktu dan tempat, serta kemampuan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Di banyak desa, PKBM bekerja sama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam merancang program pembelajaran yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal, seperti pertanian organik, pengolahan hasil alam, atau kerajinan tradisional (Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, 2022).

Strategi Penguatan Dan Pengembangan CBE

Secara teoritis, pendidikan berbasis masyarakat memiliki landasan kuat dalam pemikiran para tokoh pendidikan kritis. Paulo Freire, misalnya, menyatakan bahwa pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan penindasan. Melalui proses dialogis, masyarakat diajak untuk menyadari kondisi sosial mereka dan diberdayakan untuk melakukan perubahan. CBE, dengan sifatnya yang partisipatif dan kontekstual, merupakan bentuk nyata dari apa yang Freire sebut sebagai *education for liberation*. Pendidikan dalam CBE bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan proses reflektif yang menumbuhkan *critical consciousness* atau kesadaran kritis terhadap ketimpangan dan hak-hak dasar, termasuk hak atas pendidikan (Freire, 1970).

Dalam praktiknya, keberhasilan CBE sangat bergantung pada kapasitas sosial masyarakat itu sendiri. Kapasitas sosial mencakup sejauh mana masyarakat memiliki solidaritas, jaringan sosial yang kuat, serta kesediaan untuk bekerja bersama dalam menyelenggarakan pendidikan. Jika komunitas memiliki rasa kepemilikan terhadap proses belajar, maka mereka cenderung lebih aktif dan berkomitmen dalam menjaga keberlanjutan program. Misalnya, ketika warga menyumbangkan waktu, tenaga, atau tempat untuk kegiatan belajar, maka hal ini menjadi modal sosial yang penting dalam pengembangan pendidikan berbasis masyarakat (Furqon, 2021).

Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci dalam penguatan CBE. Kebijakan yang mendukung dapat berupa penyediaan dana operasional, pelatihan untuk fasilitator, insentif bagi pendidik non-formal, serta integrasi CBE dalam rencana pembangunan daerah. Beberapa daerah telah menerapkan strategi ini dengan mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan PKBM atau taman bacaan masyarakat. Langkah ini membuktikan bahwa ketika pemerintah daerah memiliki komitmen, maka pendidikan berbasis masyarakat dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Faktor-faktor lain seperti LSM, organisasi keagamaan, dan perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam mendukung CBE. Mereka dapat menyediakan sumber daya, pendampingan teknis, hingga advokasi kebijakan. Sinergi antara masyarakat,

pemerintah, dan organisasi pendukung menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan nyata. Di banyak wilayah, LSM berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan sumber daya eksternal, serta membantu membangun kapasitas lokal dalam manajemen program pendidikan non-formal.

Ke depan, pengembangan CBE harus memperkuat prinsip kemandirian dan keberlanjutan. Ini berarti mendorong komunitas untuk tidak hanya sebagai penerima program, tetapi juga sebagai perancang dan pengelola utama pendidikan mereka sendiri. Melalui pendekatan ini, pendidikan akan lebih dekat dengan kehidupan, relevan dengan kebutuhan, dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal. CBE bukan sekadar alternatif sementara, melainkan solusi strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan sosial di Indonesia.

Penguatan kapasitas komunitas merupakan fondasi utama dalam pengembangan pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education/CBE*) yang berkelanjutan. Kapasitas ini tidak hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga kesadaran sosial, kepemimpinan lokal, dan kemampuan berorganisasi. Oleh karena itu, pelatihan, fasilitasi, dan pendampingan menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah berperan penting sebagai enabler yakni pihak yang menciptakan ekosistem yang mendukung melalui regulasi, pembiayaan, dan penguatan kelembagaan (Suryadi, 2019).

Namun, dalam praktiknya, implementasi CBE menghadapi sejumlah tantangan besar. Tantangan pertama adalah keberlanjutan program. Banyak inisiatif CBE yang tidak dapat bertahan lama karena bergantung pada dana hibah atau semangat relawan yang tidak selalu stabil. Ketergantungan pada pendanaan jangka pendek membuat program rentan berhenti ketika dukungan eksternal berkurang. Tantangan kedua adalah keterbatasan dana operasional dan sumber daya manusia yang terlatih. Ketiga, masih kurangnya dokumentasi praktik-praktik baik yang dapat menjadi model untuk direplikasi di tempat lain, menyebabkan pengetahuan tentang CBE tersebar secara sporadis dan tidak sistematis (UNESCO, 2022).

Selain kendala teknis, terdapat pula tantangan persepsi. Pendidikan berbasis masyarakat kerap kali dianggap sebagai bentuk pendidikan “kelas dua” yang tidak setara dengan pendidikan formal. Hal ini menyebabkan CBE kurang memperoleh legitimasi kelembagaan yang memadai. Padahal, jika dikelola dengan baik, CBE mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki keterikatan kuat dengan komunitas dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Pengakuan terhadap CBE sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional menjadi krusial agar pendekatan ini mendapat tempat yang sejajar dan dihargai secara proporsional.

Relevansi CBE semakin nyata dalam konteks pemulihan pascapandemi COVID-19. Pandemi telah menyebabkan gangguan besar dalam proses pendidikan formal, yang mengakibatkan *learning loss*—terutama di kalangan anak-anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil. CBE, dengan fleksibilitas dan kedekatannya dengan komunitas, dapat menjawab kebutuhan pendidikan darurat dan mengisi celah yang ditinggalkan oleh sistem formal. Misalnya, pembelajaran berbasis kelompok kecil, kegiatan literasi berbasis rumah, atau pelatihan keterampilan praktis dapat diinisiasi oleh komunitas lokal sebagai respons cepat terhadap krisis pendidikan (Brookings Institution, 2021).

Dalam situasi pascakrisis seperti ini, pendekatan pendidikan yang partisipatif dan kontekstual menjadi sangat penting. CBE dapat mengembalikan makna pendidikan

sebagai proses sosial yang membangun relasi, solidaritas, dan ketahanan masyarakat. Dengan menjadikan pendidikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, CBE tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembangunan karakter, penguatan jati diri lokal, dan pemulihan sosial-emosional peserta didik. Ini menjadikan CBE lebih dari sekadar solusi teknis, tetapi sebagai strategi kultural untuk membangun kembali masyarakat yang resilien dan berdaya.

Transformasi sistem pendidikan Indonesia menuju arah yang lebih inklusif dan adaptif memerlukan pengakuan terhadap pendekatan alternatif seperti CBE. Dengan prinsip partisipasi, kontekstualitas, dan kemandirian, CBE dapat menjadi komplementer yang kuat terhadap pendidikan formal. Sistem pendidikan nasional harus membuka ruang yang lebih luas bagi inisiatif lokal untuk berkembang, termasuk melalui kebijakan afirmatif yang mendukung inovasi pendidikan berbasis komunitas. Ini berarti menciptakan regulasi yang memungkinkan pengakuan setara terhadap hasil belajar non-formal dan informal.

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci untuk memperkuat peran strategis CBE. Pemerintah, LSM, perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas perlu bersinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pendekatan multi-aktor ini memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya yang lebih adil, pertukaran pengetahuan yang lebih luas, dan pengembangan kapasitas yang lebih menyeluruh. Dengan begitu, CBE tidak berjalan sendiri sebagai inisiatif marginal, tetapi menjadi bagian dari upaya nasional untuk membangun pendidikan yang lebih merata dan bermakna.

Dengan demikian, pendidikan berbasis masyarakat bukan sekadar strategi alternatif untuk menjawab kekurangan sistem pendidikan formal, tetapi dapat menjadi pendekatan transformatif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang multidimensional. Dalam jangka panjang, CBE berpotensi membentuk paradigma baru pendidikan yang berakar pada nilai gotong royong, pemberdayaan lokal, dan keadilan sosial. Dukungan kebijakan yang berpihak dan komitmen kolektif dari berbagai pihak akan memperkuat posisi CBE sebagai motor penggerak perubahan menuju sistem pendidikan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pendidikan berbasis masyarakat (CBE) memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan akibat faktor geografis, ekonomi, dan sosial. Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai lokal, CBE tidak hanya menyediakan akses pendidikan bagi mereka yang sulit dijangkau oleh sistem pendidikan formal, tetapi juga memberdayakan komunitas untuk turut serta dalam pengembangan pendidikan itu sendiri. Dengan memberdayakan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pendidikan, CBE dapat menciptakan pendidikan yang relevan, kontekstual, dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi CBE masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbatasnya dukungan kebijakan, kurangnya sumber daya, dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan berbasis komunitas. Keberhasilan CBE sangat bergantung pada kapasitas lokal, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan pemerintah yang cukup untuk memastikan keberlanjutan program.

Studi kasus dan praktik terbaik yang ada menunjukkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan mampu

memberikan hasil yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan pendidikan, terutama dalam konteks daerah-daerah yang sulit dijangkau. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldrige, B. J., Beck, N., Medina, J. C., & Reeves, M. A. (2017). Toward a new understanding of community-based education: The role of community-based educational spaces in disrupting inequality for minoritized youth. *Review of Research in Education*, 41(1), 381–402. <https://doi.org/10.3102/0091732X16688622>
- Brookings Institution. (2021). *Beyond reopening schools: How education can emerge stronger than before COVID-19*. Retrieved from <https://www.brookings.edu>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. (2022). *Laporan pelaksanaan PKBM berbasis desa*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder.
- Ibrahim, R. (2017). Pendidikan berbasis nilai budaya lokal dalam masyarakat multikultural. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 22(2), 157–165.
- Kemendikbud. (2023). *Laporan tahunan pendidikan nasional 2023*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education.
- Roy, B. (2010). *The barefoot college: Teaching skills for rural transformation*. TED Talk.
- Sardiman, A. M. (2018). *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, B. (2019). Membangun pendidikan alternatif berbasis komunitas. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 5(1), 23–34.
- Suryadi, A. (2019). Peran pemerintah dalam pemberdayaan pendidikan masyarakat. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 14(2), 102–113.
- Sutarto, Y., & Mardikanto, T. (2020). Model pemberdayaan pendidikan berbasis masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 45–56.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kebijakan pendidikan: Peran komunitas dalam pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UNESCO. (2022). *Global education monitoring report 2022: Education in a post-COVID world*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- World Bank. (2020). *Indonesia: Education sector assessment*. Washington, DC: World Bank.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zubaedi. (2011). *Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Jakarta: Kencana.